

SINERGITAS *STAKEHOLDERS* DALAM INOVASI DAERAH (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))

Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Email: rahmawatitriana@yahoo.com

Abstract: *Synergy of Stakeholders in Regional Innovation (Study in Seminggu di Kota Probolinggo's Program (SEMIPRO)). The successful implementation of innovation in the local area is not done by the local government, only but requires synergy with the other stakeholders. But the problem is often a lack of involvement in the field as well as with other stakeholders SEMIPRO's program. The method used in this research is descriptive qualitative method. Research results showed that the SEMIPRO's program has been implemented five times until 2013. Stakeholders are involved in this program are society, private and government. Funding is used partly derived from Probolinggo City budget. Communication is one-way and a lack of coordination. The conclusion of this research is that the SEMIPRO's program is not an innovation as has been claimed by the City of Probolinggo. The dominance of the government's very visible from the planning to the implementation of this program. Domination by government both in terms of communication and coordination suggests that there is no synergy with other stakeholders.*

Keywords: *sinergy, governance, innovation.*

Abstrak: *Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainnya. Namun permasalahan dilapangan seringkali kurangnya keterlibatan stakeholders lainnya begitu juga dengan program SEMIPRO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SEMIPRO telah dilaksanakan sebanyak lima kali hingga tahun 2013. Stakeholders yang dilibatkan dalam program ini yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembiayaan yang digunakan sebagian berasal dari APBD Kota Probolinggo. Komunikasi bersifat satu arah dan tidak adanya koordinasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa program SEMIPRO bukan merupakan inovasi sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah Kota Probolinggo. Dominasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat terlihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam program ini. Adanya dominasi oleh pemerintah baik dalam hal komunikasi dan koordinasi menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi dengan stakeholders lainnya.*

Kata kunci: *sinergi, governance, inovasi.*

Pendahuluan

Pemberian wewenang ke daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah berarti memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu pemicu munculnya inovasi di beberapa daerah. Dalam rangka merangsang inovasi di pemerintah daerah, maka pemerintah pusat mengadakan kompetisi dalam hal inovasi daerah yang diberi nama "Innovative Government Awards (IGA)". Dengan demikian kompetisi yang diadakan oleh KEMENDAGRI ini akan semakin memacu dan menjadi *support eksternal* dari pemerintah daerah dalam berinovasi agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga

menambah daya saing bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, inovasi penting dilakukan pemerintah daerah agar tidak tertinggal dari persaingan daerah lain. Terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) ini merupakan suatu upaya pemerintah pusat dalam merangsang munculnya inovasi-inovasi di daerah.

Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*). Dengan

adanya sinergi *multistakeholders* diharapkan mampu mensukseskan otonomi daerah. Namun permasalahan dilapangan seringkali kurangnya bahkan tidak ada keterlibatan dari *stakeholders* yang berkaitan dengan program dari pemerintah daerah tersebut. Kota Probolinggo memiliki beberapa program-program inovasi, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). Munculnya SEMIPRO sebagaimana dalam website DISPOBPAR Kota Probolinggo, “Sejarah *event* SEMIPRO diawali dari sebuah ide dan gagasan untuk menciptakan daya tarik Kota Probolinggo lebih berkualitas”.

Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dilaksanakan mulai pada tahun 2009, hingga saat ini sudah diselenggarakan selama 5 (lima) kali. Namun masalahnya pada keuangan daerah, dimana kegiatan inovasi ini kurang memberikan kontribusi secara maksimal. Selain itu dilihat dari pelaksanaan di lapangan yang berpartisipasi cenderung di dominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pedagang Kaki Lima (PKL) dan beberapa pemerintah daerah. Setiap tahun kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dikemas dengan tema yang berbeda-beda sehingga konsekuensinya semakin membutuhkan pembiayaan yang besar. Secara teoritis keberhasilan inovasi daerah tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan sinergitas *stakeholders* yaitu antara pemerintah (negara), masyarakat, dan swasta. Namun kenyataannya pihak swasta belum nampak keterlibatannya, padahal pihak ini dianggap pihak yang memiliki kelebihan di bidang dana dan keterampilan. Untuk itu maka penulis merumuskan masalah, bagaimanakah sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah (Studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi *stakeholders* dalam inovasi daerah (Studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)).

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Pasolong (2007, h.21) mendefinisikan administrasi publik adalah:

- Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
- Meliputi tiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.
- Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan

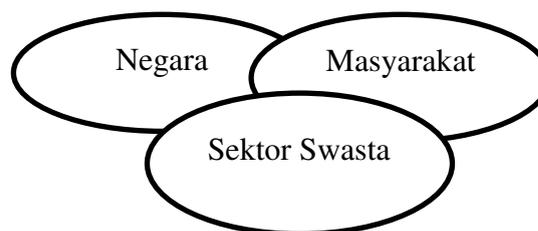
karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

- Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

2. Governance

Sumarto (2003, h.2), *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Sedarmayanti (2009, h.280) mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal
- Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar 2.1: Hubungan Antar Sektor dalam Governance

Sumber: Sedarmayanti (2009, h.280)

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti adanya kesempatan yang sama dalam

pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

3. Konsep Sinergi

Adanya interaksi antar ketiga *stakeholders* selain itu juga diperlukan adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan tersebut. Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, h.217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Moekijat (1994, h.39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1) Hubungan langsung
Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas
Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

- 4) Dinamisme
Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas
Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana
Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif
Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif
Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat

4. Good Governance

Good Governance di beberapa negara sudah meluas mulai tahun 1980, dan di Indonesia mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia, usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi (Sedarmayanti, 2009, h.270). Sedarmayanti (2003, h.7-8) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

a. Participation

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

b. Rule of law

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

c. Transparency

Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

- d. *Responsive*
Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- e. *Consensus Orientation*
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Effectiveness and efficiency*
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision*
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

5. Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah "Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

6. Konsep Inovasi

Menurut Rogers (2003, h.12), menjelaskan bahwa, "*an idea, practice, or object perceived as new by the individual*". Selain itu inovasi juga tidak terlepas dari beberapa hal antara lain:

- a. Pengetahuan baru
Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah *system social* tertentu. Pengetahuan ini merupakan factor

penting penentu perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.

- b. Cara baru
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
- c. Objek baru
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunaannya, baik berbentuk fisik (*berwujud/tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*).
- d. Teknologi baru
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
- e. Penemuan baru
Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan. (Noor (2013, h.87)).

Noor (2013, h.94) mengingatkan inovasi adalah perpaduan dari lima komponen yaitu:

- a. *Strategy and Customers*. Pemerintahan daerah harus tahu kapan, dimana, dan bagaimana inovasi itu dilakukan
- b. *Measures and Performance* yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan
- c. *Process (and Infrastructure)*, apakah inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
- d. *People*, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
- e. *Technology*, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi tersebut?

Noor (2013, h.113) mengungkapkan bahwa dalam prosesinovasi sebagai sebuah siklus ada empat komponen yang berperan yaitu: *idea generations and discovery, idea selection, idea implementation, and idea diffusion*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2012, h.4),

mendefinisikan, “metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Gambaran umum program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
 - a. Kegiatan-kegiatan dalam program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
 - b. Aktor yang terlibat program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
 - c. Sumber pembiayaan program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
- 2) Sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah yaitu pada program Seminggu di Kota Probolinggo yaitu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dilihat dari 2 (dua) hal: koordinasi dan komunikasi.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Probolinggo, sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya yang akan diteliti yaitu Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (DISPOBPAPAR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), Bagian Humas dan Protokol, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP). Analisis data yang digunakan adalah analisis “model interaktif” oleh Miles dan Huberman. Ada 3 hal yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Gambaran Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

- a. Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Seminggu di Kota Probolinggo atau yang dikenal oleh khalayak umum sebagai SEMIPRO merupakan suatu usaha pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo yang awalnya dimulai pada tahun 2009 yaitu pada masa H.M. Buchori, hingga tahun 2013 program ini telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Proses inovasi SEMIPRO yaitu berawal dari pengganti program lama yang dimunculkan oleh pemerintah, namun ternyata menuai banyak kritikan (KOBUDA). Pemerintah dan seniman Kota Probolinggo memunculkan gagasan-

gagasan baru untuk mengembangkan pariwisatanya. Program ini mencoba mengadopsi dari program yang dilaksanakan di daerah lain, namun bedanya hanya dilaksanakan selama satu minggu. Kemudian muncullah SEMIPRO. Cara baru tersebut merupakan salah satu pengertian dari inovasi. Program ini merupakan solusi atas masalah yang dihadapi khususnya dalam bidang pariwisata.

Disamping itu juga inovasi merupakan perpaduan berbagai komponen yaitu *Strategy and Customers* yaitu pelaksanaan program ini yaitu saat liburan sekolah agararganya tidak menghabiskan waktunya di luar Probolinggo. *Measures and Performances* dalam SEMIPRO tidak ada ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan inovasi ini. Dari segi PAD pun program ini tidak memberikan kontribusi pada keuangan daerahnya. *Process and Infrastructure*, keberlangsungan SEMIPRO tergantung pada pejabat yang memimpin saat itu karena program ini tidak masuk dalam peraturan daerah yang diharuskan untuk melaksanakannya tiap tahun. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwasannya program ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. *People*, Pemahaman inovasi masih sebatas pada pucuk pimpinan sehingga etos kerja masing-masing anggota organisasi masih jauh untuk menuju kategori tindakan inovatif dan cenderung bermalas-malasan. *Technology*, SEMIPRO ini merupakan inovasi di bidang pariwisata pada kenyataan di lapangan tidak memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan program. Dari komponen diatas program SEMIPRO tidak memenuhi beberapa komponen sehingga SEMIPRO tidak dapat dikatakan suatu program inovasi.

Kegiatan yang disajikan diantaranya olahraga, kesenian, kuliner, kontes/festival/lomba, pameran, pawai, KANCABA, dan lain-lain. Jumlah kegiatan yang mengisi SEMIPRO pun beragam tiap tahunnya yaitu pada tahun 2009 setidaknya terdiri dari 30 macam kegiatan, pada tahun 2010 sekitar 35 kegiatan, pada tahun 2011 terdiri dari 84 kegiatan, tahun 2012 terdapat 75 kegiatan, dan untuk tahun 2013 sekitar 50 kegiatan. Terdapat 50 kegiatan dalam satu minggu, itu artinya dalam satu hari terdapat enam kegiatan mulai pagi pukul 08.00 pagi sampai malam. Terasa sia-sia jika pemerintah menghadirkan kegiatan di pagi hari karena masyarakat pun memiliki kesibukan di pagi hari. Sehingga kegiatan yang ditampilkan di pagi hari akan sepi penonton. Banyaknya titik-titik lokasi

pelaksanaan SEMIPRO semakin membuat bingung masyarakat.

b. Aktor yang Terlibat dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Dalam tata pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *governance* diharuskan adanya interaksi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam program SEMIPRO ini pemerintah tidak mengikutsertakan *stakeholders* lainnya. Pemerintah Kota Probolinggo bertindak dominan dalam mengatur dan mengelola program ini. Keseimbangan ketiga aktor dalam program SEMIPRO ini belum begitu nampak. Namun disisi lain pemerintah pada beberapa kegiatan mendatangkan tamu dari daerah lain untuk ikutserta memeriahkan program ini. Kota Probolinggo memiliki paguyuban Kang dan Yuk Kota Probolinggo, Putri Lingkungan dan Duta lainnya, namun mereka tidak diperankan dalam program ini. Disamping itu juga pemerintah kurang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Probolinggo untuk ikutserta memeriahkan program ini. Hal ini menggambarkan pemerintah Kota Probolinggo birokrasi yang birokratis dan cenderung tertutup.

c. Sumber Pembiayaan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Otonomi daerah diterapkan membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan pada aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur. Pembiayaan yang dilakukan untuk program-program yang dimiliki pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam hal ini program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) berasal dari dana rakyat (APBD), termasuk SEMIPRO.

2. Sinergitas Stakeholders dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

a. Komunikasi

Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Komunikasi merupakan cara yang

digunakan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan rangangan atas informasi yang disampaikan. Munculnya rangangan ini artinya adanya timbal balik dari si penerima sehingga terjadilah pertukaran informasi. Komunikasi yang terjalin pun kurang begitu efektif dan interaktif sehingga masih bersifat satu arah. *Feedback* dalam komunikasi pada program SEMIPRO tidak terlihat dan didominasi oleh pemerintah Kota Probolinggo. Inefektif komunikasi yang terjadi akan mempengaruhi koordinasi dalam sebuah program yang juga berakibat mempengaruhi sinergitas yang terjadi.

b. Koordinasi

Sinergitas yang dibangun selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Koordinasi yang ada dalam program ini hanya sebatas pengumpulan (*collecting*) bantuan kontribusi dari masyarakat dan swasta. Koordinasi kegiatan yang selayaknya harus ada tetapi tidak terjadi. Bahkan untuk pengumpulan kontribusi ini saja ada permasalahan yaitu pengumpulan yang melalui beberapa pihak sehingga tidak bersifat satu pintu dan tidak tercatat dengan baik oleh pihak yang berwenang. Kurang adanya koordinasi yang efektif dalam program SEMIPRO karena komunikasi yang berjalan pun tidak efektif sehingga akan mempengaruhi sinergitas antar *stakeholders* dalam program SEMIPRO.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SEMIPRO merupakan program tahunan yang dilaksanakan biasanya pada liburan sekolah. Hingga tahun 2013 SEMIPRO dilaksanakan sebanyak lima kali.
 - a. SEMIPRO bukan merupakan program inovasi sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah Kota Probolinggo.
 - b. *Stakeholder* yang dominan dalam program SEMIPRO adalah pemerintah. Sedangkan *stakeholders* lainnya yaitu masyarakat dan swasta diposisikan sebagai pendukung kegiatan.
 - c. Pembiayaan yang digunakan dalam program Seminggu di Kota Probolinggo ini sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo dan beberapa sumbangan dari swasta namun sayangnya masih dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan dalam pelaksanaannya tidak terdapat transparansi dan akuntabilitas keuangan.

2. Tidak adanya sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam program Seminggu di Kota Probolinggo dapat dilihat dari dua hal yaitu:
 - a. Komunikasi yang terjadi bersifat satu arah sehingga tidak terjadi pertukaran informasi antar *stakeholders*.
 - b. Dalam program SEMIPRO tidak nampak koordinasi melainkan hanya sebatas mengumpulkan bantuan dari *stakeholders* lainnya.
 2. Sinergi pada sebuah program dalam *governance* tidak akan terpenuhi jika:
 1. Terdapat aktor yang dominan.
 2. Komunikasi yang searah.
 3. Tidak adanya koordinasi.
- Saran**
1. Pelaksanaan SEMIPRO dilaksanakan selama satu minggu penuh dan merupakan salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat.
 - a. Pemerintah harusnya melakukan evaluasi pelaksanaan SEMIPRO yang berpengaruh pada peningkatan PAD, tidak hanya melakukan evaluasi dampak dari SEMIPRO kepada masyarakatnya.
 - b. Seyogyanya pemerintah berperan saat perencanaan namun ketika pelaksanaan SEMIPRO serahkanlah kepada masyarakat dan swasta atau menggunakan *event organizer* yang memiliki pengalaman dan keterampilan untuk mengorganisir suatu kegiatan.
 - c. Pemerintah Kota Probolinggo seharusnya mengurangi porsi pengeluaran untuk SEMIPRO dan lebih memperbanyak *sponsorship*.
 2. Komunikasi dan koordinasi dapat terjalin jika pemerintah tidak lagi mendominasi program SEMIPRO, harusnya pemerintah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat dan swasta.

Daftar Pustaka

- DISPOBPAR Kota Probolinggo. tt. **Sekilas SEMIPRO**, available from: <<http://dispobpar-Kota-Probolinggo.com>> [Diakses pada tanggal 22 September 2013].
- Hasan, Erliana. (2005). **Komunikasi Pemerintahan**. Bandung: Refika Aditama.
- Moekijat. (1994). **Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)**. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. (2012). **Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). **Jurnal Ketransmigrasian [Internet]**, 28 (2) Desember, pp.113-124 available from: <http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI.pdf>[diakses pada tanggal 17 Maret 2014].
- Noor, Irwan. (2013). **Desain Inovasi Pemerintahan Daerah**. Malang: UB Press.
- Pasolong, Harbani. (2007). **Teori Administrasi Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Rogers, E.M. (2003). **Diffusion of Innovations 5th edition**. New York: Free Press.
- Sedarmayanti. (2003). **Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan**. Bandung: Bandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). **Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan**. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulbert. (2011). **Asas-asas Manajemen**. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. (2007). **Perilaku Organisasional**, Edisi pertama, cetakan pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2003). **Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah